TANWIR: JOURNAL OF ISLAMIC CIVILIZATION
Persatuan Pelajar Indonesia di Tunisia
Vol. 1, No. 1, Desember 2024, (16-43)
https://tanwir.ppitunisia.com/index.php/pt24/index

Dialog antara Teori dan Realitas: Analisis Tentang Pengaruh Pemikiran Reformis Terhadap Kebijakan Gender di Tunisia

Aqilah Firyal Haya
Ez-Zitouna University
21, Rue Sidi Aboulkacem El-Jelizi, Place du Leader, 1008 Tunis - Tunisie
email: aqilahhaya13@gmail.com

Abstrak

Tunisia, pasca kemerdekaan, telah menjadi pelopor dalam memperjuangkan kesetaraan gender di dunia Arab. Kebijakan "Kode Status Pribadi" yang revolusioner pada tahun 1956, diilhami oleh interpretasi ulang teks-teks keagamaan oleh para reformis. Ketika sebagian besar negara Arab masih berjuang dari belenggu kolonialisme, Tunisia telah memulai langkah berani untuk memajukan hak-hak perempuan. Akar dari kebijakan ini dapat ditelusuri kembali di abad ke-19, ketika pemikir seperti Thahir Haddad menyerukan reformasi Islam yang lebih inklusif terhadap perempuan. Namun, kebijakan feminisme negara di Tunisia seringkali terkesan dipaksakan dan dianggap terlalu cepat dan radikal dalam mendorong kesetaraan gender tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan agama yang ada. Melalui pendekatan kualitatif, tulisan ini menganalisis bagaimana interpretasi ulang terhadap teks agama dan nilai-nilai tradisional oleh para reformis telah membentuk landasan ideologis bagi kesetaraan gender di Tunisia. Disamping itu, tulisan ini juga mengungkap dinamika kompleks antara kebijakan negara dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar pada masyarakat serta bagaimana kebijakan tersebut seringkali bertentangan dengan realitas yang terjadi. Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kita dalam menunjukkan bahwa warisan intelektual para reformis banyak berkontribusi bagi dinamika perjuangan perempuan dan terus relevan serta memberikan inspirasi bagi perkembangan feminisme modern di Tunisia dengan berbagai tantangan yang terjadi hingga saat ini.

Kata kunci: Tunisia, Feminisme, Reformis

Abstract

Post-independence, Tunisia has emerged as a pioneer in advocating for gender equality in the Arab world. The revolutionary "Personal Status Code" of 1956, inspired by reformist reinterpretations of religious texts, marked a significant departure from traditional norms. While much of the Arab world was still

grappling with the aftermath of colonialism, Tunisia boldly embarked on a journey to advance women's rights. The roots of this policy can be traced back to the 19th century when thinkers like Thahir Haddad called for a more inclusive Islamic reform that would empower women. However, the state's feminist policies in Tunisia have often been perceived as imposed, overly hasty, and radical in their push for gender equality without adequately considering the existing social, cultural, and religious context. Employing a qualitative approach, this paper analyzes how reformist reinterpretations of religious texts and traditional values have formed the ideological foundation for gender equality in Tunisia. Moreover, it delves into the complex dynamics between state policies and deeply rooted traditional values within society, and how these policies often diverge from the lived realities. The findings of this research offer significant implications, demonstrating how the intellectual legacy of reformists has significantly contributed to the dynamics of women's struggles and remains relevant, inspiring modern feminism in Tunisia amidst various ongoing challenges.

Keyword: Tunisia, Reformist, Feminism

Pendahuluan

Perjuangan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender telah menjadi salah satu isu sentral dalam diskursus politik dan sosial global. Tunisia, sebagai negara di kawasan Arab, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap emansipasi perempuan sejak kemerdekaannya. Pada tahun 1956, dengan diluncurkannya Kode Status Pribadi (CSP), Tunisia menjadi pelopor dalam reformasi hukum keluarga di dunia Arab, memberikan hak-hak yang lebih luas bagi perempuan. Namun, kebijakan ini sangat kontroversial karena dinilai terlalu cepat dan tidak mempertimbangkan konteks sosial-budaya yang ada. Terlepas dari tujuan Presiden Habib Bourguiba untuk memodernisasi Tunisia dan emansipasi perempuan, banyak aktivis perempuan yang mengkritik bahwa kebijakan-kebijakan ini lebih bersifat simbolis daripada substansial, dan tidak benar-benar memperbaiki kondisi perempuan di tingkat akar rumput. Bahkan, feminisme negara yang dicanangkan oleh Bourguiba -yang dilanjutkan oleh presiden setelahnya, Ben Ali- terkesan terlalu dipaksakan dan dianggap sebagai sebuah usaha mengeksploitasi citra dan hak-hak perempuan untuk mencapai keuntungan politik semata.

Namun, dibalik gejolak ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan sosial politik yang terjadi di Tunisia hingga menyebabkan terjadinya revolusi melati (Arab Spring) pada 2011 lalu, kebijakan ini berhasil membawa citra baik negara tersebut di Eropa. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Tunisia tidak lebih baik dari negara lain di Afrika Utara seperti Maroko, dan penindasan terhadap kebebasan berbicara dan oposisi politik di Tunisia telah lama mencoreng reputasi negara tersebut di luar negeri, propaganda ini membuahkan hasil karena negara tersebut, dibawah kekuasaan Bourguiba, menikmati reputasi yang solid sebagai negara sekuler nasional dan sipil di wilayah yang lebih sering terdiri dari kediktatoran militer atau monarki yang terkait dengan agama.[1]

Yang menjadikan Tunisia menarik dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya adalah bahwa hukum yang ramah terhadap perempuan (CSP) ini tidak dianggap bertentangan dengan Islam. Sebaliknya, hukum tersebut dianggap sebagai bagian intrinsik dari filsafat dan fiqih Islam Tunisia (yurisprudensi Islam). Meskipun Tunisia sering dianggap sebagai negara sekuler, sumber-sumber Islam telah menjadi pusat konstruksi hukum keluarga di sana. Reformasi hukum yang diprakarsai oleh pemerintahan Bourguiba pasca-kemerdekaan dicap sebagai "fase baru dalam inovasi Islam" dan bukan sebagai penyimpangan dari Islam. Misalnya, hukum waris di CSP jelas dipengaruhi oleh (dan sebagian disalin dari) sumber-sumber syariah. Salah satu bab dalam Kitab Undang-Undang Hukum

[1] Wikipedia Contributors. (2024, July 8). *Women in tunisia*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Tunisia

Pidana yang membahas tentang pewarisan membahas tentang "warisan Al-Quran" yang rumusannya diambil langsung dari Al-Quran (An-Nisa' , 4: 11).[2]

Pada masa revolusi tahun 2011, perempuan ikut turun ke jalan bersama laki-laki untuk mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan mereka terhadap kekuasaan rezim Ben Ali. Sebab, sejak Tunisia merdeka, perempuan telah mengalami serangkaian ketidakadilan dan diskriminasi meski hak-hak mereka dibahas melalui kebijakan (CSP). Keberadaan kebijakan saat itu hanya dinilai sebagai alat propaganda politik dalam proses mempertahankan status quo partai berkuasa, baik pada masa pemerintahan Ben Ali maupun Bourguiba. Pemikiran mengenai posisi perempuan di Tunisia terbentuk melalui sistem patriarki dan hanya bergerak di bawah cetakan dan instruksi yang 'kompatibel dengan rezim'. Perempuan di Tunisia telah berjuang melawan kediktatoran selain mengatasi perjuangan mereka melawan tradisi budaya yang ada.[3]

Perjuangan perempuan dalam mempertahankan hak-hak dan kesetaraan menuai keberhasilan pasca revolusi 2011, yang didorong oleh pendekatan feminisme negara dalam membawa perubahan pada lanskap politik baru di Tunisia. Upaya pemberdayaan perempuan di Tunisia dimulai secara tidak langsung melalui partisipasi terbuka pada saat revolusi 2011 dan berlanjut hingga era setelahnya. Perempuan Tunisia mulai menonjol di bidang politik dan pengambilan kebijakan dengan berperan sebagai pengurus, anggota parlemen, pengambil kebijakan, dan kandidat dalam serangkaian pemilu di tingkat presiden, parlemen, dan pemerintah daerah. Meskipun pendekatan feminisme negara di Tunisia masih tunduk pada kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, namun pasca-revolusi 2011 mulai memotivasi perempuan untuk terus berjuang menyuarakan pandangannya terhadap setiap isu atau kebijakan yang ada, menyangkut kepentingan dan kesejahteraan perempuan.

Pendekatan feminisme negara yang dipraktikkan oleh kepemimpinan baru Tunisia pasca revolusi 2011 telah memberikan mandat kepada parlemen dan kabinet untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkini terkait posisi perempuan. Pada masa Tunisia di bawah pemerintahan Habib Bourguiba dan Ben Ali, berbagai lembaga, LSM, dan gerakan sosial dikontrol ketat oleh penguasa. Oleh karena itu, pasca revolusi tahun 2011, masyarakat, khususnya perempuan, mewaspadai penindasan yang mereka alami selama puluhan tahun untuk terus

[2] Norbakk, M. (2016). *The women's rights champion. Tunisia's potential for furthering women's rights.* CHR. Michelsen Institute. https://www.cmi.no/publications/5973-the-womens-rights-champion

[3] Saidin, M. I. S., & Alfitri, N. A. (2020). State feminism and the women's struggles in tunisia in the post arab spring 2011. *International Journal of Islamic Thought*, *18*. https://doi.org/10.24035/ijit.18.2020.181

bersuara dan berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan nasional. Pengalaman hidup dalam kontrol dan pembatasan sejak masa pemerintahan Bourguiba dan Ben Ali menyebabkan perempuan khususnya gerakan feminis di Tunisia selalu menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan kedudukan dan status sosial perempuan dalam masyarakat.

Bagi negara yang sudah lama dipengaruhi oleh budaya patriarki, pendekatan feminisme negara di Tunisia tidak dapat dipungkiri telah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan pemerintah di berbagai tingkatan. Hal ini terlihat ketika perempuan memainkan peran penting dalam demonstrasi jalanan dan dalam proses penyusunan konstitusi Tunisia yang baru. Perempuan melihat proses dialog dan perundingan multilateral sebagai platform terbaik bagi perjuangan mereka dalam menegakkan hak-hak mereka dan selanjutnya memimpin Tunisia menuju demokrasi. Tunisia pasca-revolusi berhasil mengukir namanya di kancah internasional dengan dinobatkan sebagai peraih Nobel Perdamaian 2015. Hal ini juga turut menyumbang pada berbagai pengakuan yang diberikan kepada Tunisia dalam hal hak asasi manusia dan posisi perempuan.

Sepak terjang dan dinamika perjuangan perempuan di Tunisia dalam mempertahankan haknya tak bisa dipisahkan dari kontribusi para pemikir reformis yang ikut mewarnai perjuangan perempuan dan memberikan banyak pengaruh bagi terbentuknya pola pikir masyarakat terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam hal kesetaraan gender. Bahkan, gerakaan reformis di Tunisia mengenai kesetaraan gender telah ada sekitar satu abad yang lalu, ketika Khairuddin Pasha pada tahun 1856 menyerukan keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Lalu dilanjutkan oleh Thahir Haddad, yang terkenal dengan sebutan "Bapak Feminisme Tunisia" melalui pemikirannya yang tertuang dalam buku *"Imro'atuna Fii asy-Syari'ah wa al-Mujtama'",* yang dianggap sebagai "revolusi" pada saat itu. Meskipun banyak mendapat kritikan tajam, perjuangannya membuahkan hasil dengan diterjemahkannya pemikiran Haddad dalam kebijakan negara oleh Bourguiba dengan dibentuknya *"Majallah Ahwal asy-Syakhsiyyah"* atau CSP (kode status pribadi) pada tanggal 3 Agustus 1956, hanya enam bulan setelah Tunisia merdeka.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, menganalisis bagaimana pemikiran para tokoh reformis dapat memberikan pengaruh dan kontribusi dalam dinamika perjuangan perempuan dan kebijakan pemerintah dalam membentuk feminisme negara di Tunisia, kedua, menganalisis kompleksitas dan keselarasan antara kebijakan pemerintah mengenai kesetaraan gender yang seringkali bertentangan dengan realitas yang terjadi.

Penelitian mengenai feminisme dan kesetaraan gender di Tunisia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Studi-studi sebelumnya telah banyak membahas dampak Kode Status Pribadi terhadap kehidupan perempuan Tunisia, serta peran negara dalam mempromosikan kesetaraan gender. Beberapa penelitian juga telah menganalisis tantangan yang dihadapi oleh gerakan feminisme di negara ini, seperti resistensi dari kelompok konservatif dan dampak dari perubahan politik.

Jennifer Cotton misalnya, dalam tesisnya pada tahun 2006 yang berjudul *"Forced Feminism: Women, Hijab, and The One-Party State in Post-Colonial Tunisia"* meneliti tentang pemaksaan ideologi feminis di Tunisia pasca-kolonial, khususnya dalam konteks hubungan antara negara satu partai, perempuan, dan simbol identitas seperti hijab. Ia memaparkan adanya konflik atau ketegangan antara kebijakan pemerintah dengan pilihan individu, terutama perempuan, terkait dengan identitas dan kebebasan mereka dalam menentukan pilihan. Sementara Kira Jinkinson dalam essainya pada tahun 2020 yang berjudul *"State Feminism and the Islamist-Secularist Binary: Women's Rights in Tunisia"* terfokus pada bagaimana peran negara dalam mempromosikan hak-hak perempuan di Tunisia, khususnya dalam konteks biner sekuler-Islamis. Dengan menelusuri sejarah Tunisia sejak kemerdekaan, esai ini menunjukkan bagaimana rezim otoriter memanfaatkan isu perempuan untuk tujuan politik sekaligus mengungkap kompleksitas antara agama, negara, dan dinamika perjuangan perempuan Tunisia setelah revolusi 2011.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan tentang dinamika gender di Tunisia. Namun, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung terfokus pada aspek politik dan sosio-historis, serta kurang memberikan perhatian pada dimensi lainnya, seperti meneliti bagaimana pemikiran para reformis mendasari kebijakan feminisme negara yang berlaku hingga saat ini. Selain itu, sedikit sekali penelitian yang secara khusus menganalisis peran interpretasi ulang teks agama khususnya Islam dalam membentuk landasan ideologis bagi feminisme di Tunisia.

Penelitian ini akan mengisi kekosongan dalam literatur dengan melakukan analisis mendalam tentang bagaimana pemikiran para reformis, seperti Habib Bourguiba dan Thahir Haddad, secara spesifik telah membentuk dan mempengaruhi kebijakan feminisme negara di Tunisia. Dengan menggabungkan perspektif historis, sosiologis, dan politik, penelitian ini akan mengungkap kompleksitas interaksi antara agama, negara, dan masyarakat dalam perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis tentang reinterpretasi atau penafsiran ulang terhadap teks-teks agama khususnya Islam -karena Tunisia merupakan negara dengan penduduk

mayoritas muslim- yang dilakukan oleh para reformis -yang kemudian mendapat banyak kecaman dari para tokoh konsevatif- dan dampaknya bagi kesejahteraan perempuan Tunisia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis pengaruh pemikiran reformis terhadap kebijakan gender di Tunisia, dengan fokus pada transformasi hukum negara dan agama dalam perjuangan pemberdayaan perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi kajian literatur, analisis jurnal ilmiah, artikel, studi kasus, serta kebijakan pemerintah terkait isu gender dan reformasi hukum. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan analisis wacana dan konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam pemikiran reformis yang memengaruhi penyusunan dan implementasi kebijakan gender. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ide-ide reformis membentuk dinamika relasi gender di Tunisia dalam kerangka normatif dan praktik sosial.

Hasil dan Pembahasan

A. Jejak Pemikiran: Tokoh-Tokoh yang Mengubah Lanskap Gender Di Tunisia

1. Thahir Haddad dan Perjuangan Kesetaraan

Nama lengkapnya adalah Thahir bin Ali bin Balqasim al-Haddad. Ia lahir di Ibukota Tunis pada tahun 1899. Keluarganya merantau dari desa ke ibukota. Ia berusia 12 tahun ketika sang ayah meninggal dunia. Sejak kecil, Thahir al-Haddad belajar di Kuttab. Baru pada tahun 1920, ia menempuh pendidikan di kampus Zaitunah.

Ia berkecimpung di dunia politik dengan bergabung ke dalam partai "*Al-Hizb Al-Hurr Al-Dusturiy" (Parti Libre Destourien),* sejak 1920 sampai 1930. Ketika Partai Destour didirikan, ketuanya memilih Haddad untuk bertanggung jawab atas propaganda dan media. Namun, partai ini tidak bertahan lama karena menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial Prancis, para pemimpinnya dipenjara, dan ketuanya diasingkan.[4] Di partai politik ini, ia banyak menyuarakan

[4] Mayabi, H. (2019, June). *الطاهر حداد.. كفّره علماء الزيتونة وانتشرت أفكاره بعد وفاته.* Aljazeera. https://doc.aljazeera.net/portrait/2019/6/12/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-

kepentingan kelas buruh. Bergabungnya Thahir al-Haddad ke partai politik adalah peran besar alumni kampus Zaitunah lainnya, Abdul Aziz al-Tsa'alabi. Di bawah supervisi al-Tsa'alabi, Thahid al-Haddad menjadi aktivis sekaligus intelektual sejati. Al-Tsa'alabi banyak mendukung gerakan dan langkah al-Haddad serta mempengaruhi pola pemikirannya.[5]

Setelah Perang Dunia Pertama, Tunisia mengalami pergolakan intelektual yang signifikan akibat kebangkitan gerakan pers dan gerakan pembebasan. Haddad menyadari momen historis ini dan terjun langsung ke dalam arena perdebatan melalui tulisan dan pidato. Pada tahun 1918, artikel-artikelnya mulai diterbitkan di surat kabar Al-Ummah dan beberapa surat kabar lainnya. Tulisannya penuh dengan ide-ide yang menantang sehingga namanya menjadi terkenal di kalangan pembaca dan elit politik. Haddad terus berjuang melalui media, menulis surat tentang reformasi Al-Zaitouna dan menerbitkan esai berjudul *"al-hakim al-ma'bud".*

Setelah kedatangan Muhammad Ali al-Hami dari Jerman, Haddad menjadi dekat dengannya dan terpengaruh oleh ide-ide modern yang dibawa al-Hami dari negara-negara Barat. Al-Hami mendirikan serikat pekerja Tunisia yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan antara pekerja Tunisia dan Prancis di bawah kepemimpinan orang Tunisia sendiri.

Setelah aksi mogok besar yang dipimpin oleh para serikat pekerja baru, para demonstran ditangkap dan dipenjara. Haddad mendokumentasikan kerja dan tujuan serikat pekerja dalam sebuah buku pertamanya berjudul *"Al-'Ummal al-Tunisiyyun wa al-Zhuhur al-Harakah al-Niqabiyah" (Tunisian Workers and the Emergence of the Trade Union Movement)* yang juga mencakup laporan-laporan pertemuan Serikat Pekerja Umum Tunisia, mengusulkan analisis lengkap mengenai situasi kelas pekerja Tunisia yang berada di bawah pengawasannya.

Buku yang diterbitkan pada tahun 1927 ini memberikan kontribusi besar dalam membangkitkan hati nurani para pekerja di Tunisia. Peneliti Nour al-Din Sirib menulis bahwa Haddad adalah salah satu reformis pertama yang melihat permasalahan secara keseluruhan tanpa memisahkan politik dari masyarakat.

%D9%83%D9%81%D9%91%D8%B1%D9%87-
%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA

[5] Jazuli, I. (2023, January). *Thahir haddad, bapak feminisme tunisia*. NU Online. https://jabar.nu.or.id/opini/thahir-al-haddad-bapak-feminisme-tunisia-YKl5z

Namun, pemerintah kolonial prancis menyita dan melarang perederan buku tersebut, karena dianggap berpotensi menciptakan kekacauan sosial.

Haddad bukan hanya seorang intelektual dan penulis, tetapi juga seorang pejuang yang aktif terlibat dalam membela apa yang ia yakini. Abdul Jalil Bouqra, seorang ahli sejarah politik Tunisia, mengatakan kepada Al Jazeera Documentary, Haddad adalah seorang revolusioner dan intelektual sejati dalam arti bahwa ia tidak hanya memberikan teori dan bimbingan kepada masyarakat seperti kebanyakan intelektual lainnya, tetapi juga berpartisipasi dalam perjuangan bersama rakyat.[6]

- **Perjuangan Kesetaraan Gender**

Melalui analisis mendalam terhadap problematika sosial di masanya, Al-Haddad menyimpulkan bahwa perubahan sistemik hanya dapat dicapai melalui transformasi yang dimulai dari akarnya. Ia menggarisbawahi peran sentral keluarga dalam membentuk masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, Al-Haddad menempatkan reformasi keluarga sebagai fondasi utama dalam agendanya. Lebih lanjut, ia mengidentifikasi kesenjangan gender sebagai tantangan signifikan yang menghambat kemajuan sosial. Terlebih, ia melihat realitas yang ada tentang diskriminasi dan kekerasaan terhadap perempuan di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai langkah pertama, Al-Haddad menganjurkan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan perjuangan untuk kesetaraan gender sebagai langkah strategis dalam mencapai tujuan transformasi sosial yang lebih luas.

Didorong oleh keprihatinan terhadap kondisi sosial perempuan, Al-Haddad melakukan kajian mendalam terhadap teks-teks keagamaan, khususnya Islam. Melalui analisis kritis, ia menilai bahwa pandangan dan pemikiran keagamaan konservatif menjadi penghambat kebebasan dan kemajuan perempuan. Menurutnya, pandangan fikih pada saat itu sangat diskriminatif terhadap perempuan Sebagai respons, Al-Haddad melakukan reinterpretasi terhadap tafsir dan pandangan para ahli fikih, khususnya dalam konteks keluarga. Hasil kajiannya, yang tertuang dalam buku *"Imra`atunâ fî al-Syarî'ah wa al-Mujtama'",* memberikan kontribusi yang signifikan dalam diskursus reformasi pemikiran Islam, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak perempuan.[7]

Pada saat itu, perempuan Tunisia tidak mempunyai hak yang sama dengan perempuan Perancis, jadi ini adalah perjuangan besar lainnya bagi Thahir Haddad, "Perempuan -seperti yang ia tulis dalam pendahuluan bukunya- adalah ibu dari laki-laki," tetapi juga "separuh dari manusia dan separuh masyarakat

[6] Mayabi, H., *op. cit.*
[7] Jazuli, I., *op. cit.*

dalam kualitas dan jumlah, dan perempuan adalah kekuatan produktif di berbagai bidang". Oleh karena itu, Haddad mencela pola tradisional yang merampas perempuan dalam memperoleh pendidikan, budaya dan kehidupan atas nama moralitas dan agama.

Dengan memerdekakan perempuan, Haddad ingin memerdekakan masyarakat, maka ia mulai mengungkap pikiran mereka. Ia menampilkan Islam sebagai agama yang berkembang dan beradaptasi dengan kehidupan modern. Ia secara khusus mengandalkan Al-Qur'an untuk membuktikan dengan jelas bahwa Islam bukanlah unsur penindasan terhadap perempuan. Sebaliknya, hal inilah yang membawa pada pembebasannya, dan merupakan satu-satunya cara bagi masyarakat Tunisia untuk mengimbangi perkembangan dunia modern secara umum. Dengan cara ini, jelas bahwa Islam selalu memandang perempuan setara dengan laki-laki, dan oleh karena itu ia menyerukan sejumlah reformasi, terutama yang berkaitan dengan masalah poligami atau perceraian. Ia ingin melegalkan isu-isu yang sudah ketinggalan zaman ini, agar perempuan bisa mendapatkan kembali kebebasan dan martabatnya. [8]

Dalam bukunya, Al-Haddad melakukan kajian mendalam terhadap posisi perempuan dalam dua ranah utama: *"al-Tasyri'iyyah"* (hukum) dan *"al-Ijtima'iyyah"* (kehidupan sosial). Pada bagian pertama, ia menganalisis berbagai aspek seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak perempuan lainnya seperti usia menikah, hak memilih pasangan hidup, hak menikahkan diri tanpa wali, dan poligami. Sementara dalam konteks sosial, ia membahas isu-isu seperti peran perempuan dalam masyarakat, ekonomi, dan politik. Melalui kajian ini, Al-Haddad menyoroti ketidakadilan dan kekerasan yang dialami perempuan akibat sistem patriarki yang didukung oleh hukum, tradisi, dan interpretasi agama yang konservatif.

Untuk memperkuat argumennya, Al-Haddad melakukan dialog dengan sejumlah ulama terkemuka dari berbagai mazhab fikih. Dalam diskusi ini, ia membahas isu-isu krusial seperti posisi perempuan dalam keluarga dan

[8] Qashri, M. (2024, October). *طاهر حدّاد: أوّل منظّر لمسألة المرأة ورائد قانون الأحوال الشخصية في تونس* Hafryat.com. https://hafryat.com/ar/blog/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%91%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

masyarakat. Melalui dialog tersebut, Al-Haddad berusaha mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi perempuan dan mendorong terjadinya reformasi dalam pemahaman mengenai hukum Islam. Kepada mereka al-Haddad mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai hak-hak perempuan. Antara lain:

1. Sejauh mana perempuan memiliki otonomi dalam memilih pasangan hidup tanpa intervensi wali?
2. Apakah perempuan memiliki hak penuh untuk mengelola harta kekayaannya secara mandiri?
3. Apakah perempuan memiliki akses yang setara dalam berbagai peran publik, termasuk menjadi imam shalat (bagi siapa saja), atau menjadi hakim pengadilan dan jabatan publik lainnya?
4. Bagaimana pandangan Islam mengenai batasan aurat bagi perempuan dan tujuan dari aturan tersebut?
5. Apakah hubungan suami-istri didasarkan pada prinsip kesetaraan atau hierarki? Sejauh mana perempuan memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga?
6. Sebatas manakah perempuan wajib menutup tubuhnya dari pandangan mata orang lain sebagai cara menjaga kehormatannya? Bagaimana cara yang paling efektif untuk menjaga kehormatan perempuan tanpa membatasi kebebasannya?

Secara keseluruhan, jawaban dan pandangan dairi para ulama tersebut cenderung konservatif dan masih terikat pada tradisi fikih klasik. Meskipun ada beberapa pandangan yang lebih modern, namun secara umum, perempuan masih dianggap memiliki posisi yang subordinatif dibandingkan laki-laki, diantara jawabannya adalah:

- Soal tubuh: Semua ulama sepakat bahwa seluruh tubuh perempuan merupakan aurat yang harus dilindungi dan ditutupi. kecuali wajah dan telapak tangan.
- Hak atas tubuh, seperti memilih pasangan hidup dan menikahkan diri tanpa wali: Banyak pandangan ulama yang cukup progresif, diantaranya adalah perempuan berhak memilih dan melakukan akad tanpa wali jika sudah *"rusyd"* (dewasa secara intelektual). Tetapi dalam masalah perceraian, hak cerai tetap di tangan laki-laki menjadi pandangan mayoritas.
- Aktivitas sosial, ekonomi, hukum dan politik: Pandangan secara umum cukup progresif. Perempuan boleh berdagang, menjadi hakim pengadilan, atau pejabat negara dengan catatan tidak sebagai pengambil keputusan/kebijakan. Tetapi untuk kepemimpinan puncak, mereka sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dalam ruang domestik dan publik., seperti pemimpin negara dan rumah tangga, apalagi dalam ruang privat (memimpin shalat). Meskipun perempuan diizinkan untuk berpartisipasi dalam

berbagai aktivitas, namun peluang mereka untuk menduduki posisi kepemimpinan sangat terbatas.[9]

Setelah berdiskusi dengan para ulama, Al-Haddad tetap merasa tidak puas. Ia menilai bahwa para ulama cenderung berpegang teguh pada pandangan pendahulunya tanpa mempertimbangkan konteks zaman yang terus berubah. Mereka lebih fokus pada penafsiran teks secara literal daripada menganalisis makna yang terkandung di dalamnya dalam konteks sosial yang dinamis. Akibatnya, hukum Islam sering kali dianggap sebagai sesuatu yang statis dan tidak dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sikap abai mereka terhadap kajian sosiologis tersebut yang membuat mereka merasa tidak ada keharusan untuk mengubah hukum sejalan dengan perubahan zaman. Mereka juga tidak memberikan perhatian yang cukup untuk mengkaji syariat dari segi *maqhasid* nya (tujuannya).*[10]*

Al-Haddad berpendapat bahwa pandangan diskriminatif terhadap perempuan bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan manusia. Meskipun Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang menegaskan kesetaraan, namun dalam praktiknya, banyak interpretasi yang justru memperlakukan perempuan secara tidak adil. Al-Haddad menekankan bahwa hukum Islam terkait hak-hak perempuan bukanlah sesuatu yang final, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Sayangnya, umat Muslim menganggapnya statis dan final tanpa boleh melakukan perubahan.

Al-Haddad mengajukan sejumlah kritik terhadap pemahaman mengenai hukum Islam terkait perempuan, serta menawarkan alternatif yang lebih progresif. Beberapa usulannya antara lain:

- Usia minimal pernikahan tidak didasarkan pada baligh secara biologis tetapi minimal pada *"sinn al-rusyd"* (kematangan berpikir).
- Keputusan perceraian sebaiknya diserahkan kepada pengadilan, bukan hanya menjadi hak prerogatif suami. Al-Haddad bahkan mengusulkan pembentukan Pengadilan Keluarga.
- Praktik poligami, menurut Al-Haddad, tidak memiliki dasar yang kuat dalam Islam dan seharusnya dihapuskan secara bertahap. Dan pada saat ini, Poligami sudah waktunya untuk dilarang.

[9] Mohammad, H. (2018, April). *Ngaji kitab "Imra`atunâ fî al-Syarî'ah wa al-Mujtama'" karya thahir al-Haddad*. Rumah Kitab. https://rumahkitab.com/ngaji-kitab-imraatuna-fi-al-syariah-wa-al-mujtama-karya-thahir-al-haddad/

[10] Haddad, T. (1929). *Our women in shari'a and society* (امرأتنا في الشريعة و المجتمع) (Vol. 7, p. 63). Daar al-'Arabiyah lii al-Kitab

- Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan dan kenegaraan, termasuk dalam pengambilan keputusan politik..
- Penggunaan jilbab dan hijab lebih merupakan tradisi budaya daripada kewajiban agama, dan karenanya dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman.
- Perempuan harus dibebaskan dari segala bentuk diskriminasi dan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam bidang apapun.[11]

Al-Haddad secara khusus mengkritik kewajiban berhijab dalam Islam. Ia berargumen bahwa tidak ada dalil yang kuat dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang mewajibkan perempuan untuk mengenakan hijab secara penuh, termasuk niqab. Menurutnya, andaikata diwajibkan, niscaya Nabi akan menegaskannya, dan niscaya para ulama Islam tidak akan berbeda pendapat, termasuk di dalamnya pada sahabat Nabi dan ulama yang sezaman dengan mereka. Bahkan, Al-Haddad berpendapat bahwa kewajiban berhijab justru dapat menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam kehidupan perempuan.[12]

Dalam uraian selanjutnya di bagian akhir buku ini, Al-Haddad mengemukakan bahwa pemakaian hijab dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti kesulitan dalam memilih pasangan hidup, pembatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta potensi terjadinya penyimpangan seksual seperti *"liwâth"* (sodomi), *"musâhaqah"* (lesbian), dan *"al-'âdah al-sirrîyyah"* (masturbasi/onani). Ia juga berpendapat bahwa Al-Qur'an lebih menekankan pada pentingnya etika dan kesopanan daripada pada aturan berpakaian yang rigid.

Pandangan al-Haddad dalam hal ini tampak sejalan dengan pandangan al-Tsa'alabi dalam buku *"Rûh al-Taharrur"* dan Nazirah Zainuddin di Mesir dalam bukunya *"Al-Sufur wa al-Hijâb"*. Publikasi pandangan Al-Haddad ini kemudian diterima publik dan ditafsirkan sebagai ajakan untuk melepas hijab. Namun, perlu ditekankan bahwa yang dimaksud Al-Haddad dengan hijab yang harus ditinggalkan adalah niqab atau cadar yang menutupi seluruh wajah, bukan jilbab yang hanya menutupi rambut.[13]

Tentang kepemimpinan publik Al-Haddad berpendapat bahwa tidak ada dasar dalam Al-Qur'an yang melarang perempuan untuk memegang jabatan publik atau terlibat dalam urusan pemerintahan. Ia meyakini bahwa perempuan

[11] Mohammad, H. *op. cit.*
[12] Haddad, T. *op. cit.*
[13] Mohammad, H. *op. cit.*

memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki untuk memimpin dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.

Lebih lanjut, Al-Haddad menghubungkan masalah diskriminasi terhadap perempuan dengan rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Ia berargumen bahwa pendidikan merupakan kunci untuk memajukan perempuan dan, pada akhirnya, memajukan bangsa. Oleh karena itu, Al-Haddad menyerukan perluasan akses pendidikan bagi perempuan, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengembangkan potensi diri.

- **Tantangan dan Kontroversi**

Gagasan-gagasan revolusioner yang diutarakan Al-Haddad dalam bukunya telah mengguncang dunia Islam dan memicu reaksi keras, terutama dari kalangan ulama konservatif di madrasah Zaitunah, seperti Syekh Thahir ibn 'Asyur. Gagasan-gagasan revolusioner yang diutarakan Al-Haddad dalam bukunya telah mengguncang dunia Islam dan memicu reaksi keras, terutama dari kalangan ulama konservatif di madrasah Zaitunah, seperti Syekh Thahir ibn 'Asyur. Al-Haddad dihujani berbagai tuduhan negatif, mulai dari dianggap sebagai orang gila, munafik, hingga kafir dan murtad bahkan penghancur agama. Almamaternya, Universitas Zaitunah, bahkan mencabut gelar akademiknya sebagai bentuk penolakan terhadap pemikirannya. Dewan Ulama Zaitunah juga mengeluarkan fatwa yang menyatakan Al-Haddad telah keluar dari Islam.

Sejumlah ulama lain turut serta dalam menyerang Al-Haddad, di antaranya adalah Syekh Muhammad Shalih ibn Murad yang menulis buku *"al-Hiddad 'alâ Imra`ati al-Haddâd"* (betapa malangnya Perempuan yang mengikuti al-Haddad). Kritik serupa juga disampaikan Syaikh Umar al-Madani dalam bukunya *"Sayf al–Haqq 'ala Man Lâ Yarâ al–Haqq*" (Pedang Kebenaran untuk orang yang menentang kebenaran). Media massa pun turut serta dalam perdebatan ini, dengan banyaknya artikel yang mengutuk pemikiran Al-Haddad dan mencapnya sebagai sesat. Beberapa judul artikel yang muncul saat itu antara lain *"Hawlâ Zindiqât al-Haddâd*" (Tentang Kemungkaran Al-Haddad), *"Mawqif al-Shahâfah al-'Arabîyyah Hawlâ Nâzilât al-Haddâd"* (Sikap Pers Arab Terhadap Krisis Al-Haddad), *"Khurafât al-Sufur"* (Mitos Perjalanan), dan *"Ayna Yashilu Ghurur al-Mulhidîn"* (Sampai Mana Kesesatan Para Penyangkal Agama).[14]

Segala kritikan tersebut selalu ia tanggapi dengan tulisan untuk mempertahankan argumentasinya. Sayangnya ia mendapat respon negatif dari berbagai pihak. Bukunya dilarang beredar, bahkan ia dipecat dari posisinya

[14] Mohammad, H. *op. cit.*

sebagai notaris ia dibuang dan diasingkan di Arab Saudi. Tekanan yang kuat dari berbagai arah ini membuat Tahar mengalami depresi berat dan berdampak pada kesehatannya yang semakin memburuk. Pada 7 Desember 1935, ia menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke 36 tahun.[15]

Meskipun fisiknya telah tiada, ide-ide progresif Tahar al-Haddad terus hidup dan menginspirasi banyak orang. Setelah kemerdekaan Tunisia, pemerintah mengakui secara resmi kontribusi besarnya. Sebagai bentuk penghargaan, Al-Haddad dianugerahi gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional dan tokoh feminis Tunisia. Potretnya kini menghiasi berbagai ruang publik, dari lembaga pendidikan hingga kantor pemerintahan, sejajar dengan pahlawan-pahlawan nasional lainnya. Banyak sekolah swasta dan jalan raya di Tunisia yang dinamai untuk menghormatinya, termasuk didirikannya "sekolah Thahir Haddad". Reputasinya pun dipulihkan. Beberapa gagasan pemikirannya kemudian diterjemahkan oleh Presiden Bourguiba ke dalam kebijakan negara yang kita kenal sebagai *"Majallah Ahwal Asy-Syakhsiyyah"* (CSP).

2. Bourguiba dan Modernisasi Hukum Keluarga di Tunisia

Habib Bourguiba adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah Tunisia. Ia memimpin perjuangan kemerdekaan dari Prancis dan kemudian menjadi presiden pertama Tunisia. Selama masa pemerintahannya, Bourguiba berhasil membawa perubahan besar di Tunisia, terutama dalam bidang sosial dan politik. Meskipun begitu, ia adalah sosok yang kompleks dan kontroversial dalam sejarah Tunisia. Di satu sisi, ia adalah pahlawan nasional yang berhasil membebaskan Tunisia dari penjajahan dan membawa perubahan besar bagi negara. Di sisi lain, ia juga merupakan seorang pemimpin otoriter yang membatasi kebebasan rakyat. Meskipun demikian, kontribusi Bourguiba dalam memajukan status perempuan di Tunisia tidak dapat diabaikan. Reformasi yang dilakukannya telah membuka jalan bagi perempuan Tunisia untuk meraih kesetaraan gender.

Pada tanggal 10 Agustus 1956, Bourguiba mendedikasikan seluruh pidatonya untuk kebijakan mengenai hukum keluarga (Kode Status Pribadi/CSP) yang akan diumumkan tiga hari kemudian. Ia menggambarkannya sebagai reformasi radikal yang akan menjadikan pernikahan sebagai "masalah negara dan tindakan yang harus diawasi oleh hukum publik dan masyarakat secara keseluruhan". Disusun oleh lima belas ahli hukum, yang sebagian besar berbahasa Arab, di bawah pengawasan Menteri Kehakiman, Ahmad Mestiri. Kode tersebut disahkan setelah kemerdekaan dan bahkan sebelum penyusunan konstitusi. Dihimpun dalam dua belas buku, kode tersebut memberikan status unik kepada

[15] Furqoni, A. T. (2020, December). *Tahar haddad: Ulama tunisia yang memperjuangkan hak-hak perempuan*. Islami.co. https://islami.co/tahar-haddad-ulama-tunisia-yang-memperjuangkan-hak-hak-perempuan/

perempuan di dunia Arab-Muslim. Diumumkan pada tanggal 20 Maret 1956, yang kemudian disahkan pada tanggal 13 Agustus di tahun yang sama.[16]

Kode Status Pribadi (CSP) memberikan hak kepada perempuan terkait dengan proses perceraian, persetujuan pernikahan, hak asuh anak, dan warisan, larangan poligami dan menetapkan usia minimum untuk menikah. Bourguiba menggambarkan perubahan ini sebagai reinterpretasi modern dari Al-Qur'an melalui ijtihad (interpretasi), bukannya meninggalkan agama. Seperti yang dinyatakan Bourguiba, ia menginginkan kebebasan bagi perempuan tetapi, *"tanpa merusak apapun, tanpa meninggalkan tradisi kita."* Dia melanjutkan, *"Saya memberi perempuan sarana untuk berubah, tetapi saya tidak memaksa mereka."*[17]. Jadi seperti yang dengan cepat ditunjukkan oleh Arfaoui dalam jurnalnya, kebijakan CSP tidak muncul melalui gerakan feminis akar rumput tetapi "di atas nampan". Alih-alih perjuangan nasional untuk hak-hak perempuan, Presiden Bourguiba memberikan hak-hak ini sebagai bagian dari paket modernisasi, tetapi bisa kita sebut, paket yang datang dengan harga politik.

Pada tahun 1956, Bourguiba menggabungkan tiga gerakan feminis utama menjadi satu gerakan tunggal yang disebut Serikat Wanita Tunisia Nasional (UNFT), lahir dari partai Neo-Dustur Bourguiba. UNFT, merupakan cerminan rezim pemerintahan dan kebijakan feminisnya. UNFT dan organisasi perempuan Maghribi lainnya digunakan untuk menunjukkan kepada dunia Barat bahwa Tunisia adalah negara progresif. Ilhem Marzouki, yang merupakan seorang akademisi, sosiolog, dan tokoh feminisme Tunisia, menyatakan bahwa *"perempuan (hanya) digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri dan kepentingan warga negara perempuan mereka."*[18]

B. Pengaruh Pemikiran Reformis Terhadap Kebijakan Gender di Tunisia

1. Kode Status Pribadi *(Majallah Ahwal asy-Syakhsiyah)*

[16] Code of personal status in tunisia. (2024). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Personal_Status_in_Tunisia#:~:text=The%20Code%20of%20Personal%20Status,effect%20on%20January%201%2C%201957.vvv

[17] Arfaoui, K. (2007). The development of the feminist movement in tunisia 1920s-2000s. *International Journal of the Humanities*, *5*(8). https://doi.org/10.18848/1447-9508/CGP/v04i08/42025

[18] Cotton, J. (2006). *Forced Feminism: Women, Hijab, and the One-Party State in Post-Colonial Tunisia*. https://doi.org/10.57709/1062085

Kode Status Pribadi (CSP) adalah kode keluarga inovatif yang melegalkan perceraian sipil, mengizinkan aborsi bagi perempuan yang memiliki lebih dari empat anak, melarang poligami, meningkatkan hak asuh bagi ibu, dan meningkatkan hak waris bagi anak perempuan dan cucu perempuan.

Bourguiba menggunakan retorika agama dan feminis secara selektif dalam misi modernisasinya. Meskipun Tunisia di bawah kekuasaan Bourguiba menjadi negara sekuler yang terpisah dari agama, Bourguiba menyatakan bahwa CPS dibenarkan oleh ajaran Islam. Ia mengklaim menggunakan 'ijtihad' (keterampilan berpikir kritisnya) untuk menafsirkan kembali Al-Quran seperti yang dilakukan para reformis sebelumnya. Foto-foto presiden bersama teolog Muslim terkemuka dipublikasikan untuk meyakinkan bahwa kode tersebut sesuai dengan Islam dan tradisi Tunisia.[19]

Sebagian besar hak dasar perempuan di Tunisia yang disahkan Presiden Bourguiba di dalam CPS dan diperkuat pada masa Presiden Ben Ali, meliputi penetapan usia minimum pernikahan, memberdayakan perempuan dewasa untuk memiliki hak menikah tanpa syarat persetujuan wali, kebebasan memilih dan menolak pasangan, penghapusan pernikahan siri, larangan poligami, pelarangan perceraian secara lisan dan penetapan kewajiban untuk memberitahukan kedua belah pihak serta wajib melalui pengadilan sipil untuk mengajukan dan mendapatkan perceraian, hak istri untuk mengajukan perceraian bahkan tanpa persetujuan suami atau adanya kerugian seperti kekerasan atau perselingkuhan (dan dalam hal ini pihak yang mengajukan perceraian, baik laki-laki maupun perempuan, yang bertindak tanpa mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan pada dirinya dapat dikenakan kompensasi kepada pasangan), mendapatkan hak asuh anak secara otomatis saat perceraian atau kematian ayah hingga anak mencapai usia dewasa, memiliki hak perwalian atas anak-anak yang berada dalam asuhannya terkait perjalanan anak, pendidikan, dan pengelolaan keuangan mereka, hak perempuan dewasa untuk bepergian tanpa izin terlebih dahulu dari suami, ayah, atau "wali" secara umum, haknya untuk memberikan kewarganegaraannya kepada anak-anaknya dari suami asing, penghapusan kewajiban taat kepada suami, penghapusan hukuman terhadap istri yang "tidak patuh", penghapusan istilah "kekuasaan suami" dan menggantinya dengan istilah "kepala keluarga", hak perempuan dewasa untuk aborsi tanpa izin baik sudah menikah maupun belum menikah, hak anak perempuan untuk mendapatkan warisan penuh dari ayah dan ibu mereka ketika mereka tidak memiliki saudara

[19] Jinkinson, K. (2020, July). *State feminism and the islamist-secularist binary: Women's rights in tunisia*. E-International Relations; E-International Relations. https://www.e-ir.info/2020/07/27/state-feminism-and-the-islamist-secularist-binary-womens-rights-in-tunisia/

laki-laki dan tidak adanya pembagian warisan kepada paman dan bibi serta anak-anak mereka.[20]

Kode tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957. Undang-undang ini mencatat serangkaian reformasi yang menyentuh aspek lain dari dampak agama terhadap masyarakat. Dengan demikian, pada tanggal 31 Mei, yayasan amal publik (wakaf) ditutup, sebagaimana yayasan swasta pada tanggal 1 Juli 1957. Pada tanggal 3 Agustus, pengadilan sekuler menggantikan pengadilan agama sebagai pengadilan tinggi untuk penerapan hukum Islam, sementara hukum tanggal 27 September 1957 menutup pengadilan rabbinikal Tunis. Anggota mereka diintegrasikan ke dalam badan hakim hukum umum.

Presiden Bourguiba juga mengeluarkan Surat Edaran 108 yang bertujuan untuk menyingkirkan jilbab. Dampak larangan ini berlangsung selama bertahun-tahun, yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan yang tampak religius. Periode ini menyoroti adanya kesenjangan. Pemerintah berbicara tentang modernisasi, tetapi perempuan merasakan beban kebijakan ini. Mereka berjuang dengan identitas dan keyakinan mereka.[21] Hal ini lebih seperti modernisasi dan penerapan ideologi feminisme yang dipaksakan.

Perlu diketahui bahwa sebelum kemerdekaan, Bourguiba mendukung hukum keluarga tradisional dan jilbab. Ia menggambarkan jilbab sebagai 'pertahanan terakhir identitas nasional yang terancam'. Pada malam tanggal 9 Januari 1929, seorang wanita Tunisia bernama Habiba Al-Manchari naik ke podium Asosiasi Sastra dan Progresif L'Essor, ia berbicara dengan penuh semangat tentang kondisi Tunisia yang merosot perempuan, membela gendernya, mengecam jilbab, dan mendesak masyarakat Tunisia untuk memberikan hak-hak mereka kepada perempuan Muslim dan menolak tradisi usang yang menghambat kemajuan, untuk kedua kalinya Di Tunisia, seorang perempuan Muslim berani berdiri di depan publik dan menyampaikan pidatonya secara terbuka.

Ceramah tersebut memicu reaksi keras dan kontroversi yang meluas, dan sejumlah pembicara naik ke podium untuk memujinya (seperti yang dilakukan oleh kaum sosialis Tunisia dan Perancis), atau untuk menanggapinya (seperti

---

[20] Maula, A. (2022, August). *66 عاماً على صدور مجلة الأحوال الشخصية: كيف حال التونسيات؟*. As-Safir Arabi. https://assafirarabi.com/ar/47065/2022/08/25/66-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%83/

[21] Trabelsi, K. (2024, April). *Can you wear hijab in tunisia?* Horizon Tunisia. https://horizontunisia.org/can-you-wear-hijab-in-tunisia/

yang dilakukan oleh kaum Zaituni dan Konstitusionalis). Bourguiba, yang baru Kembali dari Paris setelah menyelesaikan studinya di bidang hukum, menyerang seruan untuk membuka jilbab dan ide-ide yang disampaikan Habiba El Menchari. Ia mengatakan dalam pidatonya: *"Jangan lupa bahwa hijab memasuki tradisi kita berabad-abad yang lalu dan telah menjadi bagian integral dari subjektivitas kita dan merupakan aspek yang membedakannya dari subjektivitas lainnya berfluktuasi"*. Bourguiba melanjutkan, "Keadaan ini memaksa warga Tunisia untuk berpegang teguh pada semua manifestasi identitas mereka, bahkan dalam pakaian."[22]

Namun, setelah menjadi presiden, tepatnya di tahun 1981, Bourguiba melarang penggunaan hijab di kantor publik, sekolah umum, dan universitas, dan berulang kali menyebutnya sebagai 'kain lap kotor'. Bahkan bourguiba membuka *safsari* (jilbab tradisional Tunisia) yang tengah dipakai oleh seorang wanita didepan umum[23]. Larangan ini berlanjut hingga kepemimpinan Ben Ali dan baru dihapuskan pada tahun 2011 setelah revolusi.

Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, perempuan memperoleh hak untuk bekerja, pindah, membuka rekening bank, dan mendirikan usaha tanpa harus meminta izin dari suami mereka. Pada tanggal 1 Juli 1965 disahkan undang-undang yang mengizinkan aborsi baik untuk alasan sosial maupun terapeutik. Perempuan didorong untuk membatasi jumlah anak mereka sejak awal tahun 60-an dan pil kontrasepsi diberikan akses bebas di seluruh negeri, sehingga membatalkan undang-undang Prancis yang pada tahun 1920 melarang semua alat kontrasepsi. Undang-undang pada bulan Maret 1958 memberlakukan pernikahan sipil dan pada tanggal 14 Desember 1960, undang-undang lain membatasi jumlah anak yang menerima tunjangan keluarga menjadi empat orang. Bourguiba mendirikan Persatuan Perempuan Tunisia pada tahun 1956 dan mempercayakan kepemimpinannya dalam publisitas yang mendukung kebijakan feminisnya. Dalam pidatonya pada tanggal 26 Desember 1962, Bouguiba menyatakan: *"Pekerjaan berkontribusi pada emansipasi wanita. Melalui pekerjaannya,*

[22] Bettaieb, M. (2022, July). *عندما دافع بورقيبة عن الحجاب... مُساجلاً الطّاهر الحدّاد*. Raseef 22. https://raseef22.net/article/1088881-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF

[23] Wattan.net. (2016, August, 15). *هذه قصة أول تونسية خلع بورقيبة عنها الحجاب*. Wattan.net. https://www.wattan.net/ar/news/184410.html

seorang wanita atau gadis menjamin eksistensinya dan menjadi sadar akan martabatnya."[24]

2. Implementasi Kebijakan Feminisme Negara Terhadap Kesejahteraan Perempuan di Tunisia

Setelah revolusi tahun 2011, Partai Ennahda, yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, mengambil alih kendali politik di Tunisia. Pembahasan tentang hak-hak perempuan di parlemen semakin berkurang, bahkan organisasi-organisasi perempuan mengeluhkan adanya kemunduran dalam hal hak-hak perempuan dan meningkatnya kekerasan terhadap mereka.[25]

Meskipun terdapat tantangan dari para tokoh konservatif, perjuangan perempuan Tunisia berhasil menghasilkan beberapa pencapaian penting termasuk ditetapkannya penolakan terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), pengakuan atas kesetaraan gender dalam konstitusi, dan disahkannya undang-undang untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Ketimpangan gender masih terjadi, terutama dalam hal upah dan kesempatan kerja. Perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang tidak stabil. Contoh paling mencolok adalah perempuan pedesaan yang bekerja sebagai buruh tani dengan upah yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, bahkan hingga setengahnya. Mereka seringkali diangkut dengan truk barang yang tidak layak dan tidak memiliki perlindungan keselamatan, baik dari cuaca ekstrem maupun kecelakaan kerja. Setiap tahun, banyak pekerja perempuan pertanian menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Antara tahun 2015 dan 2022, tercatat 710 pekerja perempuan mengalami luka-luka dan 51 lainnya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, termasuk yang terbaru pada tanggal 12 Agustus 2022.

---

[24] Code of personal status in tunisia. (2024). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Personal_Status_in_Tunisia#:~:text=The%20Code%20of%20Personal%20Status,effect%20on%20January%201%2C%201957.vvv

[25] Al-Husseini, L. (2021, August). *في يوم المرأة التونسية.. نضال مستمر من أجل "المساواة"* Sky News Arabia. https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1457030-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%94%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%94%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9

Kondisi serupa juga terjadi di pabrik tekstil, pabrik pengolahan makanan, dan industri lainnya. Ribuan pekerja perempuan di sektor ini menerima upah yang jauh di bawah upah minimum, tanpa kontrak kerja tetap, atau dengan kontrak jangka pendek untuk menghindari tuntutan hak-hak pekerja. Masalah lain yang terkait dengan gender adalah hak cuti hamil. Cuti hamil di Tunisia sangat singkat, hanya satu bulan untuk pekerja swasta dan dua bulan untuk pegawai negeri (dengan kemungkinan perpanjangan hingga empat bulan dengan setengah gaji). Durasi cuti yang singkat ini tidak mendukung perempuan untuk melanjutkan karier mereka setelah melahirkan dan seringkali memaksa mereka untuk memilih antara pekerjaan dan keluarga.

Salah satu kekurangan paling menonjol dalam sistem hak perempuan di Tunisia adalah jurang yang sangat besar antara aturan tertulis (teks undang-undang) dengan kenyataan di lapangan, serta tidak meratanya penerapan kebijakan tersebut di berbagai daerah di Tunisia.

Aturan-aturan yang ada terbilang maju dan jauh melampaui kesadaran masyarakat umum. Ini bukanlah hal yang sepenuhnya negatif, karena jika kita menunggu masyarakat berkembang terlebih dahulu untuk kemudian baru mengubah aturan, maka mungkin Tunisia masih akan berdebat tentang apakah perempuan adalah manusia seperti laki-laki atau tidak. Masalahnya terletak pada ketidakmampuan aturan-aturan tersebut untuk diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, undang-undang tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah kemajuan besar, tetapi apa gunanya jika negara tidak mampu menyediakan tempat penampungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan, menjamin perlindungan dan bantuan segera, serta memberikan kemandirian finansial minimal agar para korban berani melaporkan kekerasan tanpa takut kehilangan tempat tinggal atau makanan, atau takut akan tekanan keluarga dan balas dendam pelaku? Bagaimana dengan kantor polisi dan markas Garda Nasional yang menerima laporan? Apakah lembaga-lembaga "maskulin" ini benar-benar diawasi dan dievaluasi oleh negara terkait keseriusan mereka dalam menangani laporan yang masuk? Banyak perempuan yang mengalami kekerasan dari anggota keluarga mereka pergi ke kantor polisi, namun seringkali petugas mencoba menghalangi mereka untuk melanjutkan kasus, bahkan dengan menggunakan tekanan atau kekerasan. Banyak laporan kasus kekerasan yang hanya tersimpan di meja kantor polisi dan tidak sampai ke pengadilan.

Undang-undang yang disahkan pada tahun 2017 berusaha mengatasi masalah ini dengan mengatur adanya unit khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di setiap kantor polisi. Undang-undang ini juga mengatur sanksi bagi petugas yang menghalangi korban melaporkan kasus. Namun, sebagian besar aturan ini masih sebatas tulisan di atas kertas. Pada tahun

2021 saja, setidaknya 10 perempuan Tunisia dibunuh oleh suami atau kekasih mereka (data ini diperoleh dari media, karena tidak ada data resmi, dan dalam banyak kasus kematian perempuan tidak dikategorikan sebagai feminisida oleh polisi dan pengadilan). Tercatat 69.777 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021, di mana lebih dari tiga perempatnya terjadi dalam lingkungan keluarga. Ini belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena takut, ketidaktahuan tentang hukum, atau kesulitan mengakses layanan hukum. Bahkan, di awal tahun 2023 saja, tercatat 23 perempuan telah terbunuh, 54 persen di antaranya adalah istri dan pembunuhnya adalah suami, dan 21 persen Ibu dan pembunuhnya adalah anak laki-laki.[26]

Akses perempuan ke ruang publik juga masih terbatas. Meskipun secara hukum perempuan memiliki hak untuk berada di ruang publik kapan pun dan di mana pun, namun pelecehan fisik, verbal, dan psikologis oleh laki-laki seringkali menjadi penghalang. Polisi dan aparat penegak hukum belum secara efektif mengatasi masalah pelecehan ini.

Masalah warisan juga masih menjadi persoalan. Meskipun secara hukum perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan warisan, namun di beberapa daerah pedesaan atau dalam keluarga-keluarga tradisional, perempuan seringkali tidak mendapatkan bagian warisan yang seharusnya.

Permasalahan selanjutnya adalah ketidakmerataan antara perempuan di berbagai daerah dalam mendapatkan perlindungan hukum. Latar belakang sosial dan ekonomi, serta lokasi geografis, memiliki pengaruh yang sangat besar. Misalnya, seorang dokter, dosen, atau pengusaha wanita yang tinggal di kawasan elit di ibu kota atau kota besar memiliki kemungkinan jauh lebih kecil untuk mengalami kekerasan dan eksploitasi dibandingkan dengan seorang buruh tani perempuan di pedesaan. Selain itu, peluang mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum dan institusional juga jauh lebih besar.[27]

---

[26] Mammeri, H. (2023, August 13). *هل المرأة في تونس "كاملة الحقوق" أم أنها مزايدات سياسية؟*. Independent Arabia. https://www.independentarabia.com/node/483941/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A3%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%9F

[27] Maula, A. (2022, August 25). *66 عاماً على صدور مجلة الأحوال الشخصية: كيف حال التونسيات؟*. As-Safir Arabi. https://assafirarabi.com/ar/47065/2022/08/25/66-

Front Kesetaraan dan Hak Perempuan menjelaskan bahwa, meskipun negara Tunisia berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender di semua bidang sesuai dengan konstitusi, perjanjian internasional yang telah diratifikasi, dan kebijakan yang telah diadopsi, namun tujuannya belum tercapai. Laporan Global tentang Kesetaraan Gender menempatkan Tunisia di antara negara-negara terakhir dalam mencapai kesetaraan dalam hal hak ekonomi dan sosial, sehingga memperoleh peringkat ke-126 dari 156 dalam hal bagaimana sumber daya didistribusikan dan kesetaraan peluang antara perempuan dan laki-laki, dan dalam hal partisipasi dan peluang ekonomi, ia menempati peringkat ke-144.[28]

Kesimpulan

Perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender di Tunisia telah menjadi perjalanan panjang yang dimulai sejak masa kolonial. Tokoh seperti Thahir al-Haddad memainkan peran penting dalam menanamkan benih-benih pemikiran feminis di masyarakat Tunisia dengan mengkritik pandangan tradisional yang mendiskriminasi perempuan dan menyerukan reformasi terhadap hukum Islam. Gagasan-gagasannya, meskipun kontroversial pada masanya, telah menjadi landasan bagi gerakan feminisme di Tunisia. Bahkan, ia dipresentasikan sebagai

---

%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%83/

[28] Latif, I. A. (2023, May 2). *رغم مرور 40 سنة من النضال النسوي .. تونس في المرتبة 126 من 156 في تحقيق المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية*. Assabah News Tunisia. https://www.assabahnews.tn/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD/60601-
%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-40-
%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-
%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-126-%D9%85%D9%86-
156-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8
%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9
%8A%D8%A9

A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8
%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9
%8A%D8%A9

tokoh sentral dalam sejarah modern Tunisia oleh Salma Baccar dalam filmnya "Fatma 75", sebuah film panjang yang mengulas sejarah perempuan dan gerakan feminisme di Tunisia, mulai dari zaman kuno hingga disahkannya Undang-Undang Hukum Keluarga. Film ini bertujuan untuk memulihkan reputasi dan mengabadikan namanya sebagai salah satu pemikir reformis terbesar dalam politik Tunisia pada masa kolonial Prancis.

Setelah kemerdekaan, Habib Bourguiba melanjutkan perjuangan ini dengan mengesahkan Kode Status Pribadi (CSP) yang memberikan hak-hak yang lebih luas bagi perempuan. Feminisme negara yang ditetapkan oleh Bourguiba merupakan langkah maju yang signifikan di dunia Arab. Namun, pendekatan ini juga memicu kontroversi karena dianggap terlalu top-down dan mengabaikan partisipasi aktif dari gerakan feminis akar rumput.

Meskipun Tunisia telah mencapai kemajuan signifikan dalam legislasi, implementasi hukum yang melindungi hak-hak perempuan masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari struktur hukum hingga norma sosial. Kesenjangan antara teori dan praktik, kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi ekonomi, pengaruh budaya patriarkal, dan ketidakmerataan akses terhadap keadilan terutama bagi perempuan dari latar belakang sosial ekonomi yang lemah adalah beberapa contoh tantangan yang masih harus diatasi. Diperlukan adanya upaya komprehensif yang melibatkan perubahan pada tingkat individu, masyarakat, dan negara untuk mengatasi permasalahan ini.

Kesimpulannya, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender di Tunisia adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Warisan pemikiran para reformis seperti Thahir Haddad dan kebijakan-kebijakan progresif yang dikeluarkan oleh Bourguiba telah memberikan landasan yang kuat. Namun, untuk mencapai kesetaraan yang sejati, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari berbagai pihak, termasuk perubahan sikap dan perilaku masyarakat, penegakan hukum yang lebih efektif, serta pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial. Secara keseluruhan, perjalanan menuju kesetaraan gender di Tunisia masih panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua gender dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Al-Husseini, L. (2021, August). *في يوم المرأة التونسية.. نضال مستمر من أجل "المساواة"* Sky News Arabia. https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1457030-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%94%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%94%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9

Al-Shaybi, M. L. (2019). *الحداد وبورقيبة: معركة السفور واللقاء المؤجل (1924 - 1956)* (1st ed.). Publikasi Sotimedia.

Arfaoui, K. (2007). The development of the feminist movement in tunisia 1920s-2000s. *International Journal of the Humanities*, *5*(8). https://doi.org/10.18848/1447-9508/CGP/v04i08/42025

Bettaieb, M. (2022, July). *عندما دافع بورقيبة عن الحجاب... مُساجلاً الطّاهر الحدّاد*. Raseef 22. https://raseef22.net/article/1088881-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF

Churchill, E. (2013, September). *Tahar Haddad: A towering figure for women's rights in Tunisia*. Arab Voices. https://blogs.worldbank.org/en/arabvoices/tahar-haddad-towering-figure-women-s-rights-tunisia

Code of personal status in tunisia. (2024). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Personal_Status_in_Tunisia#:~:text=The%20Code%20of%20Personal%20Status,effect%20on%20January%201%2C%201957.vvv

Cotton, J. (2006). *Forced feminism: Women, hijab, and the one-party state in post-colonial tunisia* [Georgia State University]. https://doi.org/10.57709/1062085

Furqoni, A. T. (2020, December). *Tahar haddad: Ulama tunisia yang memperjuangkan hak-hak perempuan*. Islami.co. https://islami.co/tahar-haddad-ulama-tunisia-yang-memperjuangkan-hak-hak-perempuan/

Haddad, T. (1929). *Our women in shari'a and society (امرأتنا في الشريعة و المجتمع)*

(Vol. 7, p. -63). Daar al-'Arabiyah lii al-Kitab.

Jazuli, I. (2023, January). *Thahir haddad, bapak feminisme tunisia*. NU Online. https://jabar.nu.or.id/opini/thahir-al-haddad-bapak-feminisme-tunisia-YKl5z

Jinkinson, K. (2020, July). *State feminism and the islamist-secularist binary: Women's rights in tunisia*. E-International Relations; E-International Relations. https://www.e-ir.info/2020/07/27/state-feminism-and-the-islamist-secularist-binary-womens-rights-in-tunisia/

Latif, I. A. (2023, May 2). *رغم مرور 40 سنة من النضال النسوي .. تونس في المرتبة 126 من 156 في تحقيق المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية*. Assabah News Tunisia. https://www.assabahnews.tn/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD/60601-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-40-%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-126-%D9%85%D9%86-156-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9

Mammeri, H. (2023, August 13). *هل المرأة في تونس "كاملة الحقوق" أم أنها مزايدات سياسية؟*. Independent Arabia. https://www.independentarabia.com/node/483941/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A3%D9%85-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%9F

Maula, A. (2022, August 25). *66 عاماً على صدور مجلة الأحوال الشخصية: كيف حال*

التونسيات؟. As-Safir Arabi. https://assafirarabi.com/ar/47065/2022/08/25/66-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%83/

Mayabi, H. (2019, June). *الطاهر حداد.. كفّره علماء الزيتونة وانتشرت أفكاره بعد وفاته*. Aljazeera. https://doc.aljazeera.net/portrait/2019/6/12/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D9%81%D9%91%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA

Mohammad, H. (2018, April). *Ngaji kitab "Imra`atunâ fî al-Syarî'ah wa al-Mujtama'" karya thahir al-Haddad*. Rumah Kitab. https://rumahkitab.com/ngaji-kitab-imraatuna-fi-al-syariah-wa-al-mujtama-karya-thahir-al-haddad/

Murad, A. (1931). *الحداد على امرأة الحداد، او، رد الخطاء والكفر والبدع التي حواها كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع* (1st ed.). Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.

Norbakk, M. (2016). *The women's rights champion. Tunisia's potential for furthering women's rights.* CHR. Michelsen Institute. https://www.cmi.no/publications/5973-the-womens-rights-champion

Qashri, M. (2024, October). *طاهر حدّاد: أوّل منظّر لمسألة المرأة ورائد قانون الأحوال الشخصية في تونس*. Hafryat.com. https://hafryat.com/ar/blog/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%91%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%91%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3

Saidin, M. I. S., & Alfitri, N. A. (2020). State feminism and the women's struggles in tunisia in the post arab spring 2011. *International Journal of Islamic Thought, 18*. https://doi.org/10.24035/ijit.18.2020.181

Trabelsi, K. (2024, April). *Can you wear hijab in tunisia?* Horizon Tunisia.

https://horizontunisia.org/can-you-wear-hijab-in-tunisia/

Wattan.net. (2016, August 15). *هذه قصة أول تونسية خلع بورقيبة عنها الحجاب*. Wattan.net. https://www.wattan.net/ar/news/184410.html

Wikipedia Contributors. (2024, July 8). *Women in tunisia*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Tunisia